

Rp.40.000,-

GLOBAL

jurnal politik internasional

The Rise of Eastern Hemisphere: Menguatnya Perekonomian Asia Timur

Sang Naga Membelit ASEAN:

Kebijakan Ekonomi China Pasca Diterima Sebagai Anggota WTO

Tirta N. Mursitama dan Haura E. Erwin

Internasionalisasi Yuan:

Transisi China Menuju Kekuatan Hegemon

Eryan Tri Ramadhani

From Development Assistance to Democracy Assistance:

Understanding Japan's Aid Policy for Promoting Democracy

Asra Virgianita

**Evaluasi Penataan Negara dalam Instrumen Penanggulangan
Perubahan Iklim (Perspektif Yuridis dan Ekonomis)**

Deni Bram

Mediasi Indonesia dalam Proses Perdamaian Palestina-Israel

Broto Wardoyo, Hariyadi Wirawan, dan Utaryo Santiko



Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS INDONESIA

Vol.13 No.1 Mei 2011

ISSN 1411 5492

GLOBAL

Jurnal Politik Internasional



Diterbitkan oleh:
Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS INDONESIA
Depok © Mei 2011

Vol. 13 No. 1 Mei 2011

GLOBAL

Jurnal Politik Internasional

Penanggung Jawab

KETUA DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FISIP UNIVERSITAS INDONESIA
HARIYADI WIRAWAN, PH.D.

Pemimpin Redaksi

AMALIA SUSTIKARINI, MILP

Sekretaris Redaksi

PETRONELA YULIA

Editor

PAMUNGKAS AYUDHANING DEWANTO
LARAS LARASATI

Mitra Bestari

ARTANTI WARDHANI, M.PHIL
ASRA VIRGIANITA, MA
BERLY MARTAWARDAYA, M.SC
DR. ANDRI G. WIBISANA
DRA. SUZIE SUDARMAN
FREDY B.L. TOBING, M.SI
PROF. ZAINUDDIN DJAFAR, PH.D
SYAMSUL HADI, PH.D

Alamat Redaksi

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI Depok 16424, Indonesia
Tel/Fax : +62 21 7873744
E-mail : jurnal_global@yahoo.com

Dilarang menggandakan, menyalin, atau menerbitkan ulang artikel dan/atau bagian artikel dalam jurnal ini tanpa seizin redaksi.

Perekonomian dunia tengah berguncang. Barat sebagai lokus pertumbuhan ekonomi dunia sedang dihantui oleh resesi ekonomi berkepanjangan. Pergeseran dari krisis lembaga keuangan menuju krisis defisit anggaran negara menjadi ancaman serius di berbagai negara. Bukti nyata telah terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Seluruh pihak kini tengah memalingkan muka dari Barat ke Timur, berharap pertumbuhan global dapat ditopang oleh negara-negara berkembang dan negara-negara industri baru. Kebangkitan China serta intensitas yang tinggi dalam interaksi antara Asia Tenggara dengan negara Asia Timur lainnya menjadi suatu harapan bagi alternatif penopang pertumbuhan internasional yang belakangan meradang.

Global Volume 13 No.1 ini menyajikan lima tulisan dengan tiga tulisan dengan tema besar *Global: Jurnal Politik Internasional*. Ketiganya menyoroti perkembangan ekonomi politik internasional di Asia Timur dan juga ASEAN. Sedangkan, seperti biasanya, dua tulisan lainnya mengangkat tema-tema umum yang tidak kalah menarik.

Dalam tema besar “Ekonomi Politik “ yang diangkat kali ini, Haura Erwin dan Tirta Mursitama dalam tulisannya bertajuk ***“Sang Naga Membelit ASEAN: Kebijakan Ekonomi China Dalam Periode Keanggotaan WTO”*** memaparkan sebuah cakrawala baru mengenai sejarah dan konteks ekonomi yang mendasar bagi China yang terus memperdalam jalinan kerjasama dengan Asia Tenggara. Beberapa bangunan perdagangan dan investasi telah menjadi pola kerjasama yang sangat digemari oleh China. Erwin dan Mursitama mengulas secara mendalam keterkaitan ekonomi diantara keduanya dalam kerangka besar ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Kepentingan China diulas secara gamblang dan menelisik secara tajam apa saja yang merupakan rasionalitas ekonomi China untuk melanjutkan kerjasama ini.

Tulisan kedua menyoroti menguatnya peran mata uang Yuan (RMB) China dalam penggunaan transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Indikasi ini disinyalir akan membawa mata uang Yuan menjadi salah satu alat pembayaran yang utama di dunia. Eryan Ramadhani memperlihatkan penggunaan Yuan sebagai salah satu mata uang internasional dalam indikator-indikator yang diambil dari beberapa studi sebelumnya. Tulisan bertajuk ***“Internasionalisasi Yuan: Transisi China Menuju Kekuatan Hegemonik”*** ini menekankan merangkaknya China sebagai hegemon dalam keuangan terjadi melalui tahapan demi tahapan. China juga merangkul Asia Tenggara guna melangsungkan kebijakan ini.

Untuk melengkapi konsentrasi pada Kajian Asia Timur, Asra Virgianita mendeskripsikan kinerja bantuan keuangan Jepang (*Official Development Assistance*) ke negara-negara berkembang. Secara bertahap Jepang memiliki formulasi dan langkah aksi yang nyata dalam mewujudkan bantuan keuangannya dalam rangka memperkuat proses demokratisasi di negara penerima bantuan. Terkait hal ini Asra Virgianita mengangkat Indonesia sebagai salah satu studi kasus. Dalam tulisannya yang berjudul ***“From Development Assistance to Democracy Assistance: Understanding Japan’s Aid Policy for Promoting Democracy”***, secara bertahap

Jepang melengkapi fungsi bantuan luar negerinya dengan muatan ideologis, terutama untuk mempromosikan demokrasi.

Dua tulisan lain akan diisi dengan tema umum. Pertama, tulisan Deni Bram yang bertajuk ***“Evaluasi Penataan Negara Dalam Instrumen Penanggulangan Perubahan Iklim”*** berusaha mengevaluasi sistem hukum dalam rezim penanggulangan perubahan iklim yang ada. Tulisan ini menawarkan pendekatan ekonomi sebagai salah satu solusi untuk mengisi kekosongan dalam penegakan hukum yang disepakati dalam suatu rezim. Broto Wardoyo, Hariadi Wirawan dan Utaryo Santiko menuliskan hasil penelitiannya mengenai alternatif kebijakan Indonesia untuk turut serta dalam proses perdamaian Israel dan Palestina. Tulisan yang bertajuk ***“Mediasi Indonesia Dalam Proses Perdamaian Palestina-Israel”*** ini menawarkan pendekatan *unofficial-official model* yang dipadukan dengan *backhand model* yang dipraktikkan di Taiwan.

Dengan terbitnya GLOBAL edisi kali ini, diharapkan kontribusi di dalamnya dapat menambah wawasan dan mengembangkan wacana di bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian kekhususan “Ekonomi Politik Internasional”. Selamat Membaca!!

Depok, 10 Mei 2011

Redaksi

Daftar Isi

Editorial iii-iv

Daftar Isi v

Topik Utama

Sang Naga Membelit ASEAN: Kebijakan Ekonomi China Pasca Diterima Sebagai Anggota WTO 1-20
Tirta N. Mursitama dan Haura E. Erwin

Internasionalisasi Yuan: Transisi China Menuju Kekuatan Hegemon..... 21-37
Eryan Tri Ramadhani

From Development Assistance to Democracy Assistance: Understanding Japan’s Aid Policy for Promoting Democracy 38-56
Asra Virgianita

Evaluasi Penataan Negara dalam Instrumen Penanggulangan Perubahan Iklim (Perspektif Yuridis dan Ekonomis)..... 57-74
Deni Bram

Mediasi Indonesia dalam Proses Perdamaian Palestina-Israel..... 75-93
Broto Wardoyo, Hariyadi Wirawan, dan Utaryo Santiko

SANG NAGA MEMBELIT ASEAN: KEBIJAKAN EKONOMI CHINA PASCA DITERIMA SEBAGAI ANGGOTA WTO*

Tirta N. Mursitama

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI

E-mail: mursitama@yahoo.com

Haura E. Erwin

Paskasarjana Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI

E-mail: haura.er@gmail.com

Abstract:

Since its accession to the World Trade Organization (WTO), China has been playing its greater role as a new giant economy more actively in international trade and has succeeded in strengthening its economic relations with its neighboring countries including Southeast Asian countries, which are the members of ASEAN. This paper particularly discusses China's economic policies in ASEAN after China gained its membership in the WTO. We focuses mainly on the agreement on trade in goods under the scheme of ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) and the investment agreement between China and ASEAN that affects its economic relations with ASEAN. We argue that China's economic policies in ASEAN as concrete and systematic implementation of "reform and opening up" policies initiated more than 30 years ago. Strategically, it has played one of the major and most important roles in strengthening its economic relations with ASEAN and that the state's role is the key to the success of China's economic policies in ASEAN.

Keywords: *China's economic policies, trade, ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), investment agreement, China's membership in WTO*

"Let China sleep, for when China wakes up, she will shake the world" (Napoleon)¹

Pendahuluan

Kemajuan ekonomi China sejak bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) semakin memotivasi China untuk mengembangkan kerja sama perdagangannya dengan

* Penulis berterima kasih kepada para peserta Konvensi Nasional II Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) tanggal 11-13 Juli 2011 di Bandung yang telah memberikan masukan konstruktif atas versi awal tulisan ini.

negara-negara tetangganya, terutama ASEAN. Semangat untuk melaksanakan regionalisme dimaksudkan sebagai pelatihan untuk mempersiapkan negara dalam menerapkan perdagangan bebas global yang menjadi agenda WTO.² Regionalisme dapat digunakan China dan mitra dagangnya sebagai anak tangga untuk menerapkan sistem perdagangan di lingkup yang lebih luas. Sejak bergabung dengan WTO, impor dari negara-negara ASEAN ke China naik hingga 11.36% pada tahun 2005.³ ASEAN adalah mitra perdagangan kelima terbesar China pada tahun 2005, sedangkan “China menjadi mitra dagang keempat terbesar ASEAN pada tahun 2007”⁴ dan meningkat menjadi mitra dagang ketiga terbesar ASEAN pada tahun 2010.⁵

Kerjasama yang semakin erat sejak keanggotaan WTO terlihat dengan naiknya total volume ekspor dan impor ASEAN terhadap China. Dalam jangka waktu tujuh tahun, total perdagangan ASEAN dengan China naik lebih dari empat kali lipat dari US\$42,76 juta pada tahun 2002 menjadi US\$178,19 juta di tahun 2009. Peningkatan nilai perdagangan ASEAN dengan China dapat dilihat pada tabel 1.

Peningkatan volume perdagangan China dan ASEAN yang pesat serta hubungan ekonomi yang semakin erat antara keduanya selama sepuluh tahun terakhir menjadi penting untuk dikaji mengingat sebelumnya hubungan ekonomi antara keduanya tidak pernah menjadi pusat perhatian. Sebuah studi mengenai kebijakan ekonomi dan perdagangan China setelah keanggotaan China di WTO diperlukan untuk mengetahui alasan-alasan di balik terjadinya peningkatan hubungan ekonomi China dan ASEAN. Posisi ASEAN pun semakin penting bagi China baik sebagai pasar yang sangat strategis bagi produknya maupun sebagai mitra ekonomi yang dapat memperkuat hegemoni China di Asia Timur.

Artikel ini membahas kebijakan perdagangan China sebagai salah satu faktor pendorong kerjasama ekonomi dan hubungan perdagangan China dengan ASEAN sejak China menjadi anggota WTO yang ditandai dengan pertumbuhan pesat volume perdagangan-

Tabel 1 Total Perdagangan ASEAN dengan China (2002-2009)
(Nilai dalam juta dolar)

| Mitra Dagang | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------|----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| China | 42,759.8 | 59,637 | 89,066 | 113,393 | 139,961.2 | 171,117.7 | 196,883 | 178,185 |

Sumber: *ASEAN Statistical Yearbook 2010* (ASEAN Secretariat: 2011), hlm. 69.

barang dan nilai investasi keduanya. Indikator kebijakan perdagangan China dalam artikel ini adalah kerjasama perdagangan barang China-ASEAN di bawah skema *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) dan kebijakan investasi China di ASEAN melalui perusahaan negara dan swastanya yang mempengaruhi hubungan ekonomi China dengan ASEAN.

Kebijakan Ekonomi China pasca Keanggotaan China di WTO

Setelah menjadi anggota WTO, China merevisi hukum perdagangan asingnya agar sesuai dengan ketentuan WTO. Pada tanggal 1 Juli 2004 China melegalisasi Hukum Perdagangan Asing China⁶ (*China's Foreign Trade Law*) yang mengatur bagaimana China melakukan hubungan perdagangan dengan pihak asing. Hukum Perdagangan Asing China ini terdiri dari 11 pasal dan 70 ayat yang membahas setiap detil aturan-aturan perdagangan China yang berlaku bagi China dan mitra dagangnya. Hukum perdagangan ini membahas kerjasama perdagangan dengan pihak asing, ekspor impor barang dan teknologi, perdagangan jasa, perlindungan terhadap aspek-aspek perdagangan dan hak cipta intelektual, investigasi dan pengawasan perdagangan asing, promosi perdagangan, ketentuan-ketentuan hukum, dan penyelesaian permasalahan seperti *dumping* dalam perdagangan asing.

Hubungan perdagangan regional dilandasi oleh hukum perdagangan asing China (2004) dan tertulis dalam bab 1 pasal 5 yang berbunyi, “Republik Rakyat China akan, atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, mempromosikan dan mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara dan kawasan lain, masuk ke dalam atau berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan ekonomi regional seperti perjanjian kesatuan pabean (*custom union*), perjanjian perdagangan bebas dan berpartisipasi dalam organisasi ekonomi regional.”⁷ Dengan demikian pasal ini melandasi hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan China dengan ASEAN.

Kerjasama yang dilakukan China dengan ASEAN pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketakutan ASEAN akan kekuatan ekonomi China yang sangat besar. China melakukan kebijakan-kebijakan yang spesifik kepada ASEAN untuk membantu negara-negara ASEAN menyelesaikan masalah perdagangan dan investasi serta membantu ASEAN menjaga stabilitas finansialnya. Para pemimpin China berusaha membangun citra China yang dermawan melalui proposal kerjasama ekonominya. China juga berusaha meyakinkan bahwa pihaknya siap menawarkan kerjasama yang bersifat “menang-menang” sehingga

ASEAN lebih tenang dan percaya bahwa China yang kuat akan membantu mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN.

Kebijakan Ekonomi China: Sektor Perdagangan di bawah Skema ACFTA

Skema kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN paling banyak dibicarakan. ACFTA mempromosikan China sebagai mitra utama kerjasama eksternal ASEAN dalam lima sektor prioritas yakni pertanian, sumber daya manusia, teknologi komunikasi dan informasi, investasi, dan pengembangan daerah aliran Sungai Mekong. Beberapa pihak mengklaim bahwa ACFTA pada dasarnya menguntungkan kedua belah pihak, namun sejauh ini implementasi di lapangan menunjukkan bahwa China lebih diuntungkan.⁸ *ASEAN-China Expert Group* pada tahun 2001 memperkirakan dengan masuknya China ke WTO impor China dari ASEAN akan meningkat menjadi US\$ 13,3 miliar antara tahun 2000-2005 dan 4 miliar dihasilkannya pascakeanggotaan China di WTO.⁹ Pernyataan ini terbukti dengan naiknya nilai ekspor dan impor keduanya sebesar empat kali lipat dari US\$ 42,759 juta pada tahun 2002 menjadi US\$ 178,185 juta pada tahun 2009.¹⁰

Kebijakan perdagangan China di ASEAN dalam kerjasama perdagangan barang terbagi menjadi dua yaitu fasilitasi perdagangan barang oleh China dan penerapan prinsip WTO kepada anggota ASEAN yang bukan anggota WTO. China memberikan tiga jenis fasilitasi perdagangan kepada ASEAN dengan tujuan untuk membantu ASEAN bersaing dengan China. Bentuk fasilitasi perdagangan pertama adalah dengan pemberian *Early Harvest Program* (EHP) kepada ASEAN. Program ini sebenarnya bentuk kebijakan China untuk meredakan ketakutan ASEAN akan persaingan dengan China yang produknya membanjiri kawasan Asia Tenggara. Dalam jangka waktu dua tahun (2004-2006), penghapusan tarif produk pertanian mencapai 0% dilakukan oleh China.¹¹ Terdapat sekitar 530 produk yang termasuk dalam program pembebasan tarif EHP. Untuk produk pertanian yang masuk ke dalam daftar sensitif, penurunan tarif akan dimulai pada tahun 2012, dimana semua tarif harus mencapai tingkat tarif tertinggi sekitar 20%.¹² Setelah itu semua tarif akan diturunkan lagi secara bertahap dan harus mencapai 0-5% pada tahun 2018.¹³ Hingga tahun 2010 terdapat lebih dari 1100 produk pertanian ASEAN dan China yang tarifnya telah dipangkas menjadi 0-5%.¹⁴

EHP menjadi daya tarik tersendiri bagi ASEAN mengingat sebagian besar produk ekspor ASEAN ke China adalah produk pertanian dan bahan mentah. Bagi Thailand, sektor

pertanian menempati 30% dari total sektor yang akan diuntungkan oleh ACFTA.¹⁵ Oleh karena itu, Thailand menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang merasakan keuntungan dari EHP. Melihat antusiasme Thailand terhadap EHP, China pun menjalankan kebijakan lain, yakni program percepatan penghapusan tarif. Dalam perjanjian ini, Thailand memasukkan 242 produk kategori sensitif yang tarifnya akan dipotong hingga mencapai 20% pada tahun 2012 dan 100 produk yang masuk kategori sangat sensitif akan dipotong sebesar 50% pada tahun 2015.¹⁶ Logika percepatan pemotongan tarif ini jelas, semakin cepat penurunan tarif dilakukan, semakin cepat pula Thailand dan China menikmati hasilnya. Selain dengan Thailand, China juga mengadakan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan tiga negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2005, Wen Jiabao mengumumkan PTA China dengan Laos, Kamboja, dan Myanmar yang dimulai tanggal 1 Januari 2006.

Jenis fasilitasi perdagangan kedua berbentuk bantuan langsung yang diberikan China kepada ASEAN. Pada tahun 2003, China dan ASEAN mengadakan “Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis ASEAN-China untuk Perdamaian dan Kesejahteraan”. Deklarasi yang ditandatangani pada ASEAN Summit ke-7 tanggal 8 Oktober 2003 ini merupakan rencana besar kedua pihak untuk lebih mendalami dan mengeratkan hubungan ASEAN-China yang saling menguntungkan dalam jangka waktu lima tahun yakni tahun 2005-2010. Deklarasi ini dibagi menjadi enam kategori kerjasama yang terdiri dari enam bidang dan salah satunya adalah bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi terdiri dari bidang pertanian, informasi, teknologi komunikasi, sumber daya manusia, investasi, Daerah Pertumbuhan China-Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA), dan kerjasama Usaha Kecil dan Menengah. Beberapa pasal dari rencana kerjasama bidang ekonomi secara jelas menunjukkan strategi China untuk memenangkan hati ASEAN dalam rangka ekspansi perdagangannya. Berdasarkan Rencana Aksi ini, China memberikan beberapa jenis bantuan langsung kepada ASEAN yang ditujukan untuk memfasilitasi perdagangan ASEAN.

Bantuan langsung China kepada ASEAN terbagi sebagai berikut. *Pertama*, China menawarkan program bantuan pengembangan UKM ASEAN. Niat China ini kemudian diajukan dalam kasus UKM Indonesia. Pada bulan Maret 2010, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, Sandiaga S. Uno memaparkan bahwa bantuan langsung terkait UKM yang ditawarkan China kepada Indonesia adalah skema pengadaan atau revitalisasi mesin-mesin baru serta bantuan dana dan inovasi baru bagi UKM.

Kedua, China menyatakan komitmennya untuk menyediakan bantuan teknis kepada Sekretariat ASEAN untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan butir-butir rencana yang telah disepakati. Komitmen ini terwujud pada tahun 2005 ketika China memberikan bantuan ekonomi kepada negara anggota ASEAN sebesar 3 miliar dolar.¹⁷ Kemudian pada Forum Kerjasama Perdagangan China-ASEAN tahun 2009, China membicarakan lebih jauh mengenai kesediaan China dalam memfasilitasi perdagangan dengan ASEAN. Forum ini dihadiri oleh 260 delegasi dari pemerintah China, pihak pabean China, perusahaan-perusahaan China, dan anggota ASEAN. China juga melakukan rapat konsultasi dengan pihak pabean ASEAN setiap tahunnya dalam rangka menjalankan beberapa proyek gabungan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih baik bagi ASEAN.

Ketiga, China memfasilitasi perdagangan ASEAN dengan mendirikan kelompok kerja resolusi perdagangan dan bantuan langsung. Pada Pertemuan Komisi Bersama ke-10 di Indonesia, China menandatangani *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation*. Persetujuan ini merupakan bentuk komitmen China untuk membantu Indonesia dalam penyelesaian masalah yang dihadapi sektor perdagangan Indonesia yang terkena dampak ACFTA.¹⁸ Selain itu, China melalui *Guangxi State Farms Group* telah membangun industri singkong di Thailand, Laos, dan Myanmar untuk menolong petani-petani di ASEAN meningkatkan keuntungan yang lebih besar dari ACFTA.

Fasilitasi perdagangan barang lainnya yang diberikan China terlihat dari penurunan tarif barang yang dilakukan oleh China. Sampai tahun 2009, terdapat sekitar 7.868 barang ASEAN dan China yang tarifnya telah dipangkas menjadi 0-5% di bawah skema ACFTA, termasuk di dalamnya adalah produk pertanian.¹⁹ Sebelum EHP diterapkan, rata-rata tarif yang diberikan China kepada produk pertanian ASEAN jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang diberikan ASEAN kepada produk China yang masuk. Hal ini masih terjadi bahkan setelah China menjadi anggota WTO. Pada tahun 2001 rata-rata tarif produk pertanian yang ditetapkan oleh China adalah sebesar 54%.²⁰ Setelah menjadi anggota WTO tarif yang ditetapkan China berkurang sekitar setengahnya, namun jika dibandingkan tarif yang ditetapkan ASEAN bagi produk pertanian yang datang dari China, tarif dari China jauh lebih tinggi.

Melihat jauhnya perbedaan tarif antara ASEAN dan China, maka China dan ASEAN sepakat untuk menurunkan tarifnya menjadi di bawah tarif *Most Favored Nation* (MFN) China. Hal ini mengacu kepada Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2002. Pasal 6 ayat 3b

kesepakatan ini mengatur mengenai reduksi dan eliminasi tarif yang harus dilakukan ASEAN dan China. Pada tahun 2007 tarif produk non-pertanian China telah diturunkan sampai sebesar 8,9% dari 42% tahun 1992. Sementara itu tarif produk pertanian telah dipotong menjadi 15,3% dari 54% pada tahun 2001.²¹ Pengurangan tarif MFN ini merupakan komitmen China setelah Putaran Doha dilaksanakan dan berdampak pada komitmen China dengan ACFTA. Untuk mendorong perdagangan dengan ASEAN, China kemudian mengurangi dan bahkan mengeleminasi tarifnya yang tinggi terhadap produk ASEAN seperti yang dijelaskan dalam tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Perbandingan tarif MFN China dan ACFTA dalam EHP

| Tarif MFN China | Tarif ACFTA | |
|---|-------------|------|
| | 2005 | 2006 |
| Lebih dari 15% | 5% | 0% |
| Antara 5% (inklusif) and 15% (inklusif) | 0% | 0% |
| Kurang dari 5% | 0% | 0% |

Sumber: data diakses dari aseansec.org, tanggal 20/4/11.

Tabel 3. Perbandingan Tarif MFN China dan ACFTA dalam Kesepakatan Perdagangan Barang

| Tarif MFN China | Tarif ACFTA | | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|------|
| | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 |
| Lebih dari atau sama dengan 20% | 20% | 12% | 5% | 0 |
| Antara 15% (inklusif) dan 20% | 15% | 8% | 5% | 0 |
| Antara 10% (inklusif) dan 15% | 10% | 8% | 5% | 0 |
| Antara 5% dan 10% | 5% | 5% | 0 | 0 |
| Kurang dari atau sama dengan 5% | Tetap sama | | 0 | |

Sumber: *Ibid.*

Di samping menawarkan bantuan kepada UKM ASEAN, China juga melakukan beberapa kebijakan perdagangan lainnya. Pada poin 4.4.6 Rencana Aksi, China menyatakan kesediaannya mendukung Laos dan Vietnam untuk menjadi anggota WTO.²² Kedua negara ini memang bukan anggota WTO, namun China bersedia untuk memberikan perlakuan MFN kepada keduanya. Hal ini akan berdampak pada pemberian perlakuan yang sama dari China kepada Laos dan Vietnam seperti anggota ASEAN lainnya yang memiliki keanggotaan WTO dengan beberapa pengecualian. Dengan memberikan MFN kepada kedua negara ini, China dapat menetapkan kesepakatan tarif dan non-tarif yang sama seperti anggota ASEAN lainnya,

sehingga volume perdagangannya dengan CLMV mampu meningkat. Adapun pengecualian yang diberikan China kepada anggota non-WTO — misalnya dengan memberikan waktu empat tahun setelah ACFTA berjalan kepada Vietnam untuk menghilangkan restriksi kuantitas impornya — umumnya bertujuan untuk membantu kesiapan negara tersebut untuk bersaing.

Kebijakan Ekonomi China: Investasi Asing melalui Perusahaan Negara dan Swasta

Pemerintah China telah mengatur kebijakan investasi yang mengatur tingkat dan jenis penanaman modal asing sejak Kebijakan Pintu Terbuka. Pada awal reformasi ekonomi tahun 1978, perdagangan asing China hanya menyumbang 10% terhadap PDB. Kala itu China belum melakukan penanaman modal di luar negeri dan tidak menerima investasi asing. “Pada tahun 1993, peran perdagangan terhadap PDB negara meningkat menjadi 38% di mana terdapat 60 juta dolar modal asing tertanam di lebih dari 70.000 perusahaan di China dan China segera menjadi negara dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) terbesar diantara negara berkembang lainnya.”²³ Setelah China menjadi anggota WTO beberapa regulasi diperkenalkan untuk meliberalisasi FDI dan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mudah diprediksi yang didasarkan kepada hukum dan peraturan.²⁴ Keanggotaan China di WTO diharapkan dapat menghasilkan *spill-over effect* yang positif bagi hubungan perdagangan dan investasi antara China dan ASEAN.

Sejak ACFTA diajukan, China menjadi salah satu negara utama sumber FDI yang masuk ke ASEAN setelah Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2009 investasi China yang datang ke ASEAN meningkat sebanyak 40 kali lipat sejak tahun 2002.²⁵ Meski demikian, nilai investasi China di ASEAN tidak cukup signifikan jumlahnya jika dibandingkan dengan investasi ASEAN di China. Walaupun bukan sumber FDI terpenting di China, beberapa negara anggota ASEAN seperti Singapura dan Vietnam adalah beberapa investor terpenting bagi sejumlah provinsi di China.

Salah satu indikasi semakin intensifnya kebijakan perdagangan China di ASEAN adalah dengan menjadikan dirinya penanam maupun penarik FDI di dan dari ASEAN serta bagaimana China memanfaatkan ACFTA untuk melancarkan kepentingannya di kawasan. Aktor utama dalam misi ini adalah negara dan pihak swasta. Pihak swasta dari China berperan sebagai sumber FDI bagi ASEAN sementara pihak swasta ASEAN berperan sebagai penanam modal di China. Negara memiliki kapasitas sebagai pendukung, regulator, dan pengambil keputusan-keputusan penting terkait kebijakan yang menyangkut FDI. Di

dalam negeri, pemerintah mengatur segala bentuk FDI yang masuk dan keluar serta memastikan kondisi dan lingkungan bisnis yang mendukung dan mampu menarik FDI dari negara mitra dagang, yang dalam kasus ini adalah ASEAN. Pihak swasta penanam modal yang datang dari China maupun ASEAN mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah China berupa bantuan finansial ataupun jaminan lingkungan bisnis yang mendukung dan memadai.

Hasil dari kebijakan perdagangan China di ASEAN dalam bidang investasi terlihat dari peningkatan pesat nilai FDI kedua pihak sejak tahun 2002. Pada tahun 2009, total investasi China di ASEAN adalah 2,3% dari total FDI yang masuk ke ASEAN.²⁶ Jika dibandingkan dengan FDI yang masuk dari Jepang sebesar 14,5%, dari Uni Eropa sebesar 24,2%, dan dari Amerika Serikat sebesar 8,5%, maka China adalah sumber FDI terbesar keempat di ASEAN.²⁷ Angka ini memang tidak cukup signifikan jika dilihat dari jumlah satu tahun saja (US\$ 1,5 miliar pada tahun 2009), tetapi akan terlihat cukup menjanjikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terutama saat China mengalami defisit investasi terhadap ASEAN pada tahun 2002 sebesar US\$ -71,9 juta.²⁸ Pada tahun 2010, sejak ACFTA dimulai, *Outward Direct Investment* (ODI) China di ASEAN mencapai US\$ 2,57 miliar.²⁹

Kebijakan ekonomi China terhadap ASEAN dalam sektor investasi memiliki beberapa tujuan dasar. *Pertama*, ACFTA diharapkan mampu meningkatkan investasi China di ASEAN. Terdapat beberapa keuntungan komparatif bagi China jika berinvestasi di ASEAN, seperti sumber daya alam, energi serta upah buruh yang lebih rendah dibandingkan dengan upah buruh di beberapa provinsi di China. *Kedua*, sektor swasta China akan diuntungkan dengan adanya kerjasama ACFTA di bidang investasi yang memberikan kebijakan preferensial khusus sehingga mendorong mereka berinvestasi di ASEAN. *Ketiga*, China ingin menarik lebih banyak lagi investasi yang datang dari ASEAN. *Keempat*, ACFTA sebagai sebuah kerjasama perdagangan bebas diharapkan dapat menarik lebih banyak lagi investasi ke China dari mitra dagang asing di luar ASEAN. *Kelima*, China dapat mendorong perusahaan negara dan swastanya untuk berinvestasi di ASEAN.

Kebijakan ekonomi China di ASEAN melalui sektor investasi dilakukan dengan tiga cara yaitu perjanjian investasi dengan ASEAN, penentuan fokus investasi di ASEAN, dan mengundang investasi ke dalam dengan kebijakan pajak yang kondusif bagi lingkungan bisnis dan investasi. Perjanjian investasi dengan ASEAN ditetapkan dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategis ASEAN-China yang menjadikan investasi sebagai salah satu sektor utama

yang menjadi fokus ACFTA. Pada poin 2.2.1 hingga 2.2.4 perjanjian tersebut, tertulis bahwa kedua pihak sepakat untuk saling mempromosikan investasi dengan cara meningkatkan pertukaran dan rasa saling pengertian di antara otoritas investasi dan pihak swasta ASEAN dan China.³⁰ Kedua pihak juga sepakat menjalin kerjasama antarpemerintah, asosiasi bisnis, dan institusi akademik untuk mempromosikan kebijakan investasi di ASEAN dan China. Untuk mendukung investasi di kedua wilayah, ASEAN dan China juga sepakat untuk mengadakan *ASEAN-China Business and Investment Summit* dan *ASEAN-China Business Council*.

Dalam Rencana Aksi di atas, Wen Jiabao mengajukan ide untuk mengadakan pameran perdagangan internasional tahunan yang diadakan di Nanning dalam rangka fasilitasi kerjasama ekonomi antara China dan ASEAN. Pameran ini kemudian dinamakan China-ASEAN Expo. CAEXPO tidak hanya mengundang negara anggota ASEAN, tetapi juga beberapa negara mitra dagang lainnya. Penyelenggaraan pameran ini memang dapat menguntungkan ASEAN, namun China sendiri akan lebih diuntungkan. Pemilihan Nanning sebagai tempat pameran akan menguntungkan China karena ia dapat mengenalkan kota lainnya di China yang dapat dijadikan lokasi investasi bagi ASEAN dan mitra dagang lainnya. China juga diuntungkan dengan devisa yang dihasilkan dari masuknya para peserta pameran dan turis ke negaranya.

Dalam Rencana Aksi poin 2.2.3, China berjanji untuk mendorong perusahaan-perusahaan di China untuk menjadikan negara anggota ASEAN sebagai prioritas tujuan investasi serta untuk menciptakan iklim yang menarik dan kondusif bagi arus investasi. Dorongan ini berupa dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan dana dan himbauan langsung untuk menjadikan ASEAN sebagai target ODI China.

China berinvestasi di ASEAN dengan fokus di tiga area utama investasi yaitu sumber daya alam, infrastruktur, dan transportasi. China menanamkan investasi terkait dengan pencarian energi di Asia Tenggara dengan cara mengerahkan *State-Owned Enterprise* (SOE) China yang bergerak dalam pencarian minyak seperti *China Petroleum and Chemical Company* (SINOPEC), *China National Petroleum Company* (CNPC), dan *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC). Mursitama dan Yudono bahkan menyebut sepak terjang ketiga perusahaan minyak milik pemerintah China tersebut dengan “Tiga Naga” yang menguasai industri minyak Indonesia.³¹ Walaupun Asia Tenggara tidak memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun pasokan minyak dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina cukup penting sehingga negara-negara ini tidak lepas dari diplomasi China untuk

eksplorasi minyak di negara-negara tersebut.³² Peran signifikan pemerintah China dapat dilihat dari bantuan pemerintah dalam usaha lobi-lobi politik ke beberapa negara dan dukungan modal yang sangat besar, baik berupa pinjaman ataupun pemberian modal ke tiga perusahaan minyak milik negara.³³ Contoh dari investasi China dalam pencarian energi di Asia Tenggara adalah penandatanganan kesepakatan survey dengan Filipina dan Vietnam untuk mencari cadangan minyak di Laut Cina Selatan pada tanggal 14 Maret 2005.

Dalam bidang infrastruktur China merupakan investor terbesar di Kamboja. Selain itu, China juga memberikan bantuan skala besar untuk konstruksi infrastruktur di Vietnam, Myanmar, dan Laos.³⁴ Di Kamboja, perusahaan negara China juga berinvestasi besar-besaran pada sektor infrastruktur dan kebutuhan dasar, contohnya adalah *China Road and Bridge Corporation* dan *China International Water and Electric Company*.³⁵ Di Vietnam, terdapat setidaknya 50 perusahaan China yang berinvestasi di sektor pembangkit listrik, pertambangan, besi dan baja, sepeda motor, bahan kimia, dan persenjataan. Beberapa SOE China yang berinvestasi di Vietnam adalah *China Metallurgical Construction Corporation*, *China Iron and Steel*, dan *China State Construction Engineerir and Harbin Power*.³⁶

China memandang penanaman modal untuk membangun infrastruktur di negara-negara ASEAN, terutama yang berbatasan langsung dengan China, akan menguntungkan dalam jangka panjang karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan perdagangan. Contohnya adalah inisiatif "Bridgehead Strategy" yakni pembangunan infrastruktur jalan penghubung Yunnan dan Asia Tenggara. Yunnan adalah provinsi di China yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Laos, dan Myanmar dan merupakan salah satu provinsi yang paling tinggi volume ekspor-impornya dengan Asia Tenggara. Perdagangan China dan ASEAN di Yunnan dan Guangxi mencapai 35,6% yakni sebesar 1,6 miliar dolar atau sekitar 3,8% dari total perdagangan China dan ASEAN.³⁷

ACFTA telah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi China dan ASEAN. Setelah ACFTA diajukan, China dan Bank Pembangunan Asia (ADB) berinvestasi besar-besaran di Asia Tenggara. China bahkan mendirikan *China-ASEAN Fund* sebesar 10 miliar dolar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan. Sistem kereta api yang menghubungkan China dan negara-negara aliran Sungai Mekong akan selesai pada tahun 2020 dengan China sebagai investor utama.³⁸ Dengan besarnya investasi China di ASEAN, China berharap dapat menstabilkan ekonomi provinsinya yang berada di wilayah selatan dan berbatasan langsung dengan ASEAN serta mampu meningkatkan level pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi miskin China yang berada di barat daya. Di

samping itu, China juga harus membantu ASEAN dalam bersaing dengan China. Jika ASEAN tidak dapat bersaing maka kesempatan investasi China di ASEAN pun akan rendah karena rendahnya daya serap ASEAN.

Selain perusahaan milik negara, perusahaan swasta China juga berinvestasi di ASEAN. Investasi pihak swasta China mayoritas berkisar pada investasi yang mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya alam dan bahan mentah dari ASEAN. Di Indonesia, pengusaha swasta China menanamkan modal besar-besaran pada perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kalimantan. Sementara investasi pengusaha swasta China di Thailand umumnya berada di sektor tekstil, garmen, peralatan elektronik rumah tangga, mesin bangunan, rokok, obat-obatan, perdagangan, dan perumahan.³⁹ Beberapa perusahaan China yang berinvestasi di Thailand adalah Dongguan Nokia, Zhuhai Canon, dan Intel China. Di Singapura investasi China kebanyakan berada pada sektor asuransi, perbankan, finansial, pengapalan barang, dan perdagangan.⁴⁰ Walaupun sebagian besar perusahaan China yang berinvestasi di Vietnam dan Kamboja adalah perusahaan negara, terdapat pula perusahaan swasta China yang berinvestasi di kedua negara tersebut, misalnya perusahaan telekomunikasi Huawei.

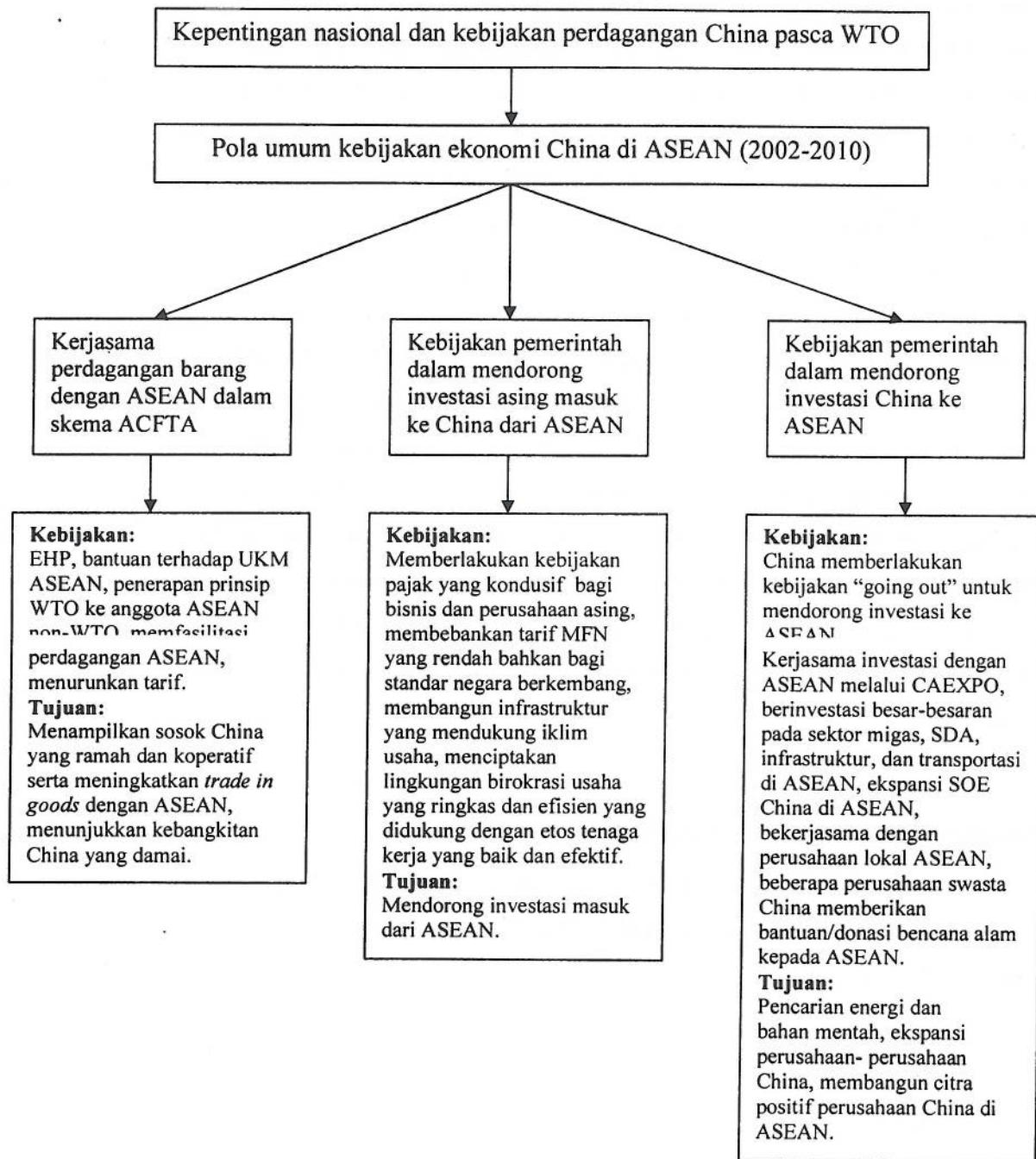
Tidak hanya mendorong investasi ke ASEAN melalui perusahaan negara dan swastanya, China juga berhasil menarik investasi dari ASEAN untuk masuk ke dalam negeri melalui kebijakan perpajakannya. Tidak seperti investasi China di ASEAN yang cenderung didominasi sektor energi, migas, dan infrastruktur, investasi ASEAN di China lebih bervariasi dan mayoritas berada pada sektor manufaktur dan jasa. Pada tahun 1991, investasi ASEAN di China hanya sekitar US\$ 90 juta, namun di tahun 1998 angka investasi tersebut naik menjadi US\$ 4,8 miliar dan US\$ 26,2 miliar tahun 2001 atau sekitar 6,6% dari total FDI yang masuk ke China.⁴¹ Di bawah kerangka kerjasama ACFTA, total investasi China di ASEAN hingga tahun 2008 melesat mencapai US\$ 6,1 miliar sedangkan investasi ASEAN di China pada tahun yang sama mencapai US\$ 5,6 miliar.⁴² Pada pertengahan tahun 2010, total investasi dua arah China-ASEAN mencapai US\$ 69,4 miliar.⁴³ Walaupun bukan sumber *Inward Direct Investment* (IDI) utama China, beberapa anggota ASEAN mulai meningkatkan investasi mereka di China terutama sejak Perjanjian Investasi ASEAN-China yang disepakati kedua pihak pada tahun 2009. Kelompok perusahaan Sinarmas dari Indonesia turut mengembangkan Zona Pembangunan Ekonomi Pelabuhan Qinzhou, China, dengan berinvestasi sebesar US\$ 1,2 miliar atau sekitar 10,88 triliun rupiah.⁴⁴ Malaysia, Thailand, dan Brunei juga mulai meningkatkan investasinya di China.

Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah investasi ASEAN di China. *Pertama*, China memberlakukan beberapa kebijakan khusus yang dapat menarik investor ke dalam negeri, misalnya perbedaan pajak. Pemerintah China menetapkan pajak yang berbeda bagi perusahaan asing (*FIEs—Foreign Invested Enterprises*) dengan perusahaan swasta domestik. Perusahaan asing (FIE) tidak diharuskan membayar pajak konstruksi dan perawatan kota seperti layaknya perusahaan lokal⁴⁵, walaupun FIE sebenarnya sangat diuntungkan dengan struktur kota dan infrastruktur China yang mendukung efektifitas dan efisiensi bisnis. Setelah penerapan Hukum Pajak Pendapatan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2008, pemerintah China juga memotong pajak pendapatan FIE yang tadinya sebesar 33% menjadi 25%.⁴⁶ Daerah Ekonomi Khusus juga dirancang pemerintah untuk menarik FDI dan menguntungkan FIE. Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerah khusus menerima perlakuan pajak khusus yang cenderung lebih ringan. China juga memberlakukan kebijakan yang mendukung ekspor perusahaan yang bertempat di China karena jika 70% produk perusahaan tersebut diekspor ke luar China maka perusahaan tersebut akan menikmati 50% potongan pajak pendapatan perusahaan.⁴⁷ Pemotongan pajak serta perlakuan yang baik kepada investor asing menjadi faktor penting naiknya IDI dari luar, termasuk dari Asia Tenggara. *Kedua*, para investor dari Asia Tenggara yang datang ke China daratan untuk berinvestasi tertarik pada tiga unsur terpenting yang dimiliki oleh China; infrastruktur yang mendukung, birokrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit, dan etos kerja buruh China yang efektif.

Penutup: Belitan Sang Naga yang Melenakan

Belitan sang Naga di ASEAN sudah semakin menyedapkan. Serangkaian kebijakan ekonomi telah dilakukan tahap demi tahap dengan sistematis. Hal ini terangkum dalam bagan berikut ini:

Bagan 1. Model kebijakan ekonomi China di ASEAN pasca keanggotaan China di WTO (2002-2011)



Model kebijakan diatas secara ilustratif memperlihatkan bagaimana China semakin serius dalam mentransformasikan ekonominya dalam konteks ASEAN. Hal ini tidak terjadi begitu saja karena sejarah kebijakan “reformasi dan pintu terbuka” sejak 1978 lalu. Konsistensi sang Naga menjalankan setiap tahapan membuahkan hasil yang mencengangkan

hingga saat ini telah muncul menjadi kekuatan ekonomi nomor dua dunia dan aktor yang harus diperhitungkan dalam hubungan internasional kekinian.

Pasca diterimanya China di WTO, pemerintah China semakin mendorong SOE maupun MNC China untuk melakukan internasionalisasi dengan tujuan meningkatkan daya saing internasional China secara menyeluruh. Dukungan pemerintah China ini didasari oleh tiga tujuan utama:⁴⁸ *pertama*, mendapatkan pasokan sumber daya alam secara aman untuk kepentingan domestik; *kedua*, memberikan kontribusi pada penyesuaian pembangunan ekonomi China yang sedang dan terus berlangsung; *ketiga*, meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan China.

China menyadari kekhawatiran ASEAN, terutama negara anggotanya yang masuk kategori negara berkembang, dalam menghadapi persaingan dengan China. Jika ASEAN ketakutan, maka hubungan ekonominya dengan China tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi kecemasan ASEAN atas kebangkitan China secara damai (*peaceful rise of China*), China pun meluncurkan kebijakan perdagangan yang 'ramah' dengan memahami kebutuhan ASEAN namun dilancarkan lebih intensif. Kebijakan perdagangan China di ASEAN dilakukan dengan cara mengajukan proposal kerjasama perdagangan bebas pada tahun 2000, menarik dan mendorong investasi dari dan ke ASEAN melalui kebijakan pemerintah China terhadap perusahaan negara dan swastanya untuk berekspansi ke ASEAN.

China akan mendapatkan banyak keuntungan dari ACFTA. *Pertama*, Asia Tenggara adalah sumber alternatif bagi kebutuhan energi China. Pencarian China akan minyak dan sumber daya energi lainnya di seluruh dunia telah menjadikan China sebagai negara yang menjalankan apa yang dinamakan dengan *oil-nation diplomacy*. Negara anggota ASEAN yang kaya sumber alam menjadi target impor China untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya. Beberapa perusahaan minyak milik negara China juga beroperasi di negara anggota ASEAN.⁴⁹ *Kedua*, bersama dengan ASEAN China akan membentuk sebuah pasar raksasa yang akan berguna sebagai penarik modal asing yang masuk dari negara-negara ketiga. *Ketiga*, keuntungan lainnya adalah China akan mendapatkan sumber pangan dari ekspor ASEAN untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Walaupun China juga mengekspor produk pertanian ke ASEAN, beberapa produk pertanian keduanya bersifat komplementer karena adanya perbedaan produk. China membutuhkan produk buah-buahan tropis dari ASEAN sementara ASEAN mengimpor sereal, sayur-sayuran, timbal dan seng dari China. *Keempat*, keuntungannya adalah China dapat mengalihkan perdagangan dari

perdagangan intra negara anggota ASEAN dan dari negara di luar kawasan dengan dihapuskan atau diturunkannya hambatan tarif dan non-tarif.

Skema ACFTA diajukan China tidak hanya semata untuk mengurangi kecemasan ASEAN, namun juga membantu China mendapatkan kepercayaan ASEAN akan perkembangan ekonomi China yang pesat dan damai. Dalam skema ini, China membantu mendorong ekspor pertanian ASEAN ke China dengan memberikan program EHP dan fasilitas perdagangan lainnya bagi anggota ASEAN. Peran negara sangat dominan karena seluruh bentuk bantuan yang ditawarkan China ke ASEAN selalu mengacu kepada hukum dan peraturan perdagangan asing dan ekspor impor yang dibuat dan diawasi oleh negara. Pada level atas, pemerintah China terjun langsung dalam pembuatan kebijakan perdagangan yang menekankan kepada sikap China yang kooperatif dalam melakukan hubungan dagang dengan ASEAN dalam skema ACFTA. Berulang kali pemerintah China menegaskan niat baiknya untuk membantu ASEAN meningkatkan eksportnya ke China dan bahwa China juga mendorong perdagangannya ke ASEAN.

Dalam sektor investasi, pemerintah China menyerukan kepada perusahaan negara dan pengusaha swasta untuk berinvestasi di ASEAN. Pemerintah juga menandatangani perjanjian kerjasama investasi dengan ASEAN yang diharapkan dapat mendorong investasi masuk dan keluar di kedua pihak. Kebijakan dalam negeri China yang banyak memberikan banyak kemudahan bagi iklim bisnis mampu menarik kelompok swasta dari ASEAN untuk menanamkan modal dengan China. Kelebihan China yang sangat menarik bagi ASEAN adalah infrastruktur yang baik, birokrasi yang mudah dan sederhana, serta etos kerja buruh yang tinggi dan produktif. Untuk investasi ke luar, peran negara tidak hanya dengan seruan langsung untuk menjadikan ASEAN sebagai tempat investasi China, China juga berinvestasi besar-besaran dalam bidang infrastruktur dan transportasi yang menghubungkan China dengan wilayah Asia Tenggara untuk mendorong perpindahan modal, tenaga kerja, dan distribusi barang.

Peran pemerintah China dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan perdagangan China di ASEAN telah menjadi faktor penting dalam peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan China dan ASEAN terutama sejak keanggotaan China di WTO. Kebijakan ini merupakan salah satu *output* dari kebijakan ekonomi dan perdagangan asing China secara umum terutama dalam kerjasama perdagangan barang dan investasi melalui ekspansi perusahaan negara dan swastanya. Benang merah dari kebijakan di tiga bidang kerjasama tersebut adalah karakteristik kebijakan perdagangan China yang sifatnya lebih integratif dan

visioner jika dibandingkan dengan kebijakan perdagangan China di ASEAN sebelum keanggotaannya di WTO.

Anggota ASEAN, termasuk Indonesia, seharusnya dapat belajar banyak dari China yang berhasil memajukan ekonominya dengan menyusun kebijakan-kebijakan perdagangan yang sesuai dengan tuntutan WTO tanpa perlu mengubah tatanan politiknya. RRC juga berhasil maju dengan seperangkat kebijakan yang revolusioner, visioner, dan total dengan memperhitungkan penuh sumber daya yang dimilikinya serta resiko-resiko yang harus diambil. China berhasil menyusun dan menjalankan kebijakan perdagangannya demi mencapai kepentingan nasionalnya.

ASEAN juga harus belajar tentang bagaimana campur tangan pemerintah China dalam memenangkan persaingan dagang dengan negara mitra. Jika ASEAN ingin bersaing dengan China maka ASEAN harus membenahi persoalan-persoalan domestiknya terlebih dahulu. Misalnya, dengan membuat perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih komprehensif dan terperinci yang dapat menarik investasi asing, memastikan kejelasan hukum demi lingkungan bisnis yang lebih kondusif, membangun industri strategis yang dapat mendorong pertumbuhan produksi barang manufaktur dalam negeri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat memenangkan persaingan.

Daftar Pustaka

Buku dan jurnal

- Bahl, Raghav. *Super Power? The Amazing Race between China's Hare and India's Tortoise*. (England: Penguin Books, 2010)
- Goh, Evelyn dan Sheldon W. Simon, eds. *China, the United States, and Southeast Asia*. (London: Routledge, 2008)
- Inayati, Ratna Shofi, ed. *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?*. (Jakarta: LIPI, 2006)
- Kang, David C. *China Rising : Peace, Power, and Order in East Asia*. (New York: Columbia University Press: 2007)
- Kusuma, Dwijaya. *China Mencari Minyak: Diplomasi China ke Seluruh Dunia 1990-2007*. (CCS: 2008)
- Larcon, Jean-Paul, ed. *Chinese Multinationals*. (Singapore: World Scientific, 2009)
- Montesano, Michael J. dan Lee Poh Onn, eds. *Regional Outlook: Southeast Asia 2011-2012*. (Singapura: ISEAS Publishing, 2011)
- Mursitama, Tirta N., dan Maisa Yudono. *Strategi Tiga Naga: Ekonomi Politik Industri Minyak Cina di Indonesia*. (Jakarta: CEACoS Universitas Indonesia dan Kepik Ungu, 2010)
- Pambudi, Daniel dan Alexander C. Chandra. *Garuda Terbelit Naga*. (Jakarta: Institute for Global Justice, 2006)

Shirk, Susan L. *How China Opened Its Door: The Political Success of the PRC's Foreign Trade and Investment Reforms*. (Washington D.C.: The Brookings Institution, 1994)
Swee-Hock, S. *ASEAN-China Economic Relations*. (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2007)

Artikel internet

- 'Beijing Keen to Unlock ASEAN Investment Doors', *Asia Times* (2011),
<http://www.atimes.com/atimes/China_Business/HK02Cb01.html> [diakses pada 20 April 2011]
- 'China to help push forward Doha round talks', *The Financial Express* (2011)
<http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=1741> [diakses pada 13 April 2011]
- 'Foreign Trade Law of the People's Republic of China'
<<http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html>> [diakses pada 22 Februari 2011]
- 'Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity' < <http://www.aseansec.org/16805.htm> > [diakses pada 21 April 2011]
- 'RI, China set up working group to overcome ACFTA's impact', *Antara News* (2010)
<<http://antara.co.id/en/news/1270479482/ri-china-set-up-working-group-to-overcome-acftas-impact>> [diakses pada 5 April 2010]
- 'Sinarmas Investasi Rp 10 Trilyun di China', *Antara News* (2010)
<<http://www.antaranews.com/berita/1287888564/sinarmas-investasi-rp-10-triliun-di-china>> [diakses pada 24 April 2011]
- ASEAN, 'ASEAN-China Investment Agreement: Fact Sheet'
<<http://www.aseansec.org/Fact%20Sheet/AEC/2009-AEC-031.pdf>> [diakses pada 24 April 2011]
- Ditjen KPI, 'China-ASEAN FTA Rate (China's Tariff Book 2009)'
<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Website_tr/Preferential%20Tariff/ASEAN-CHINA/China_s%20tariff%20book%20in%202009.pdf> [diakses pada 2 April 2011]
- Frost, Stephen, 'Going to Southeast Asia: Chinese Foreign Direct Investment and Its Implications', City University of Hong Kong
<http://www.cctr.ust.hk/materials/conference/workshop/2/Frost-SE_Asia_Dstr-01.pdf> [diakses pada 27 April 2011]
- Yue, Chia Siow, 'ASEAN-China Free Trade Area.' <
<http://www.hiebs.hku.hk/aep/chia.pdf>> [diakses pada 1 April 2011]

Catatan Akhir

- ¹ Bahl, Raghav, *Super Power? The Amazing Race between China's Hare and India's Tortoise* (England: Penguin Books, 2010), hlm. 1.
- ² Daniel Pambudi dan Alexander C. Chandra, *Garuda Terbelit Naga* (Jakarta: Institute for Global Justice: 2006), hlm. 15
- ³ Chen Wen, 'ASEAN-China Trade Relations: Origins, Progress and Prospect' dalam S. Swee-Hock. *ASEAN-China Economic Relations* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies: 2007), hlm. 72.
- ⁴ *Ibid*.
- ⁵ Situs resmi ASEAN <<http://www.aseansec.org/23752.htm>> [diakses pada 7 Desember 2010]
- ⁶ *Foreign Trade Law* China dipublikasikan oleh Situs Kementerian Perdagangan Asing China dalam Bahasa Mandarin dan Inggris pertama kali pada tanggal 1 Juli 2004. Hukum ini terdiri dari 11 pasal dan 70 ayat. Data diakses dari
<http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html>

[22 Februari 2011].

⁷ *Ibid.*

⁸ Michael J. Montesano dan Lee Poh Onn, eds, *Regional Outlook: Southeast Asia 2011-2012* (Singapura: ISEAS Publishing: 2011), hlm. 4

⁹ Dalam makalah Chia Siow Yue, *ASEAN-China Free Trade Area*. Makalah ini dipresentasikan di Konferensi AEP di Hong Kong, 12-13 April 2004. Diakses dari situs <http://www.hiebs.hku.hk/aep/chia.pdf> pada tanggal 1 April 2011.

¹⁰ *ASEAN Statistical Yearbook 2010*, *op.cit.*, hlm. 69.

¹¹ Pambudi dan Chandra, *op. cit.*, hlm. 60.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ditjen KPI, 'China-ASEAN FTA Rate (China's Tariff Book 2009)' diakses dari situs http://ditjenkpi.depdag.go.id/Website_tr/Preferential%20Tariff/ASEAN-CHINA/China_s%20tariff%20book%20in%202009.pdf pada 2 April 2011.

¹⁵ Evelyn Goh and Sheldon W. Simon, eds. *China, the United States, and Southeast Asia* (London: Routledge: 2008), hlm. 25.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ David C.Kang, *China Rising : Peace, Power, and Order in East Asia* (New York: Columbia University Press: 2007), hlm. 132.

¹⁸ 'RI, China set up working group to overcome ACFTA's impact' diakses dari situs <http://antara.co.id/en/news/1270479482/ri-china-set-up-working-group-to-overcome-acftas-impact> pada 5 April 2010.

¹⁹ *China-ASEAN FTA Rate (China's Tariff Book 2009)*, *loc.cit.*

²⁰ 'China to help push forward Doha round talks' diakses dari situs http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=1741 pada 13 April 2011,

²¹ *Ibid.*

²² Bunyi poin 4.4.6 Rencana Aksi adalah "Support the accession of Laos and Viet Nam to the WTO at the earliest possible time."

²³ Susan L. Shirk, *How China Opened Its Door: The Political Success of the PRC's Foreign Trade and Investment Reforms* (Washington D.C.: The Brookings Institution, 1994), hlm. 2.

²⁴ *Trade Policy Review: China 2008* (World Trade Organization and Bernan: 2008), hlm. 24.

²⁵ *ASEAN Statistical Yearbook 2010*, *op. cit.*, hlm. 110.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Poin yang dimaksud berada dalam *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. Data diakses dari <http://www.aseansec.org/16805.htm>., tanggal 21 April 2011.

³¹ Baca Tirta N. Mursitama dan Maisa Yudono, *Strategi Tiga Naga: Ekonomi Politik Industri Minyak Cina di Indonesia*, (Jakarta: CEACoS Universitas Indonesia dan Kepik Ungu, 2010).

³² Dwijaya Kusuma, *China Mencari Minyak: Diplomasi China ke Seluruh Dunia 1990-2007*. (CCS: 2008), hlm. 82.

³³ *Ibid.*, hlm. 80.

³⁴ "Beijing Keen to Unlock ASEAN Investment Doors", diakses dari http://www.atimes.com/atimes/China_Business/HK02Cb01.html, tanggal 20 April 2011.

³⁵ Dalam makalah Stephen Frost, *Going to Southeast Asia: Chinese Foreign Direct Investment and Its Implications*. (City University of Hong Kong), hlm. 21. Diakses dari http://www.cctr.ust.hk/materials/conference/workshop/2/Frost-SE_Asia_Dstr-01.pdf, tanggal 27 April 2011.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ratna Shofi Inayati Ed., *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?*. (LIPI: 2006), hlm. 93.

³⁸ Montesano and Lee Poh Onn Ed., *op.cit.*, hlm. 19.

³⁹ Goh and Simon, Ed., *op.cit.*, hlm. 28.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Goh and Simon, *op. cit.*, hlm. 27.

⁴² *ASEAN-China Investment Agreement: Fact Sheet*, diakses dari <http://www.aseansec.org/Fact%20Sheet/AEC/2009-AEC-031.pdf>, tanggal 24 April 2011.

⁴³ Disampaikan dalam pidato Konselor Perdagangan Filipina Simeon L. Fernandez pada Forum Kerjasama Ekonomi China-ASEAN tanggal 5/8/10 di Beijing. Diakses dari

http://www.philembassychina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3Aremarks-by-commercial-counsellor-hernandez-in-the-china-zhengzhou-asean-econ-cooperation-forum&catid=25%3Aeconomic-news&lang=en, tanggal 1/5/11.

⁴⁴ "Sinarmas Investasi Rp 10 Trilyun di China", 24/10/10, diakses dari

<http://www.antaranews.com/berita/1287888564/sinarmas-investasi-rp-10-triliun-di-china>, tanggal 24 April 2011.

⁴⁵ *Trade Policy Review: China 2008*, *op.cit.*, hlm. 41.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Li, Zhaoxi, *China's Go Global Policy*, dalam Jean-Paul Larcon (ed), *Chinese Multinationals* (Singapore: World Scientific, 2009), hlm. 31.

⁴⁹ Baca Tirta N. Mursitama dan Maisa Yudono, *Strategi Tiga Naga: Ekonomi Politik Industri Minyak Cina di Indonesia* (Jakarta: CEACoS Universitas Indonesia dan Kepik Ungu, 2010).